



LURAH BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Baturetno Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
 36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
 37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
 38. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
 39. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
 40. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
 41. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 42. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 ((Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO
dan
LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	729.427.362,00
1) Bagi Hasil BUM Kalurahan	Rp.	5.000.000,00
2) Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem	Rp.	40.000.000,00
3) Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp.	35.858.088,00
4) Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp.	130.000.000,00
5) Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	Rp.	13.400.000,00
6) Bangunan Milik Kalurahan	Rp.	15.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	4.850.072.598,00
1) Dana Desa	Rp.	1.648.236.000,00
2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	929.226.398,00
3) Alokasi Dana Desa	Rp.	1.135.586.400,00
4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi / Dais	Rp.	370.000.000,00
5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp.	767.023.800,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	5.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp.	5.584.499.960,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	3.007.254.306,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	1.958.890.919,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	316.963.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	418.862.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	160.203.800,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp.	5.862.174.725,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(277.674.765,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	277.674.765,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	277.674.765,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Baturetno.

Ditetapkan di Baturetno

Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH BATURETNO,

TTD
SARJAKA

Diundangkan di Baturetno

Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK BATURETNO,

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (9 /BATURETNO/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,



An. Carik Baturetno
Kepala Urusan Pangripta,

SUMARMANTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO TAHUN ANGGARAN 2024				
Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	729,427,362.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,850,072,598.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5,584,499,960.00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3,007,254,306.00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.103.599.595,00	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64,128,000.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	609,124,800.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39,960,000.00	ADD,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	581,921,704.00	ADD, PAD, PBH,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	112,800,000.00	ADD,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	32,676,000.00	PAD, PBH,
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	80,314,000.00	PAD,
	1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22,220,000.00	DDS,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	87,968,520.00	PAD,
	1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	64,826,400.00	PAD,
	1.1.95.	Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K	126,590,651.00	PAD,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	94,841,520.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	186,228,000.00	ADD,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	207,575,000.00	
	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28,500,000.00	PBH,
	1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	59,075,000.00	PBH,
	1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120,000,000.00	ADD, PBH,
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57,465,000.00	
	1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7,440,000.00	PAD,
	1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2,100,000.00	PAD,
	1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29,550,000.00	PAD,
	1.3.90.	Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	18,375,000.00	DDS,
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	570,790,800.00	
	1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	30,585,000.00	PBH,
	1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	57,680,000.00	PBH,
	1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	37,630,000.00	PBH,
	1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18,640,000.00	PAD,
	1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4,200,000.00	ADD,
	1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	19,675,000.00	PAD, PBH,

1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16,750,000.00	PBH,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21,790,000.00	DDS,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	337,603,800.00	PBH, PBK,
1.4.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	6,600,000.00	PBH,
1.4.93.	Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan	7,110,000.00	PBH,
1.4.95.	Fasilitas Kegiatan Bamuskal	5,100,000.00	PAD,
1.4.96.	Fasilitas Kegiatan Padukuhan	7,427,000.00	BMP,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	67,823,911.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45,190,000.00	PBH,
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	9,683,911.00	DLL,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	12,950,000.00	PAD,
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,958,890,919.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	98,165,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14,400,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	53,965,000.00	BMP, DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	29,800,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	664,514,419.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	122,409,000.00	BMP, DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	87,380,000.00	BMP, DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24,340,000.00	DDS,
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5,940,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	332,335,419.00	BMP, DDS, PBK, SDD ,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	10,320,000.00	DDS,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7,620,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	5,960,000.00	PBH,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	32,400,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	10,800,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	25,010,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	475,538,500.00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	30,760,000.00	PBH,
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	27,480,000.00	PBH,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	313,006,140.00	DDS, PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	104,292,360.00	DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195,000,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195,000,000.00	PBP,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	125,513,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	32,685,000.00	BMP, DDS,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	92,828,000.00	BMP,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	400,160,000.00	
2.8.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	24,055,000.00	PAD,

2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	367,930,000.00	DDS, PBP,
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,175,000.00	DDS,
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	316.963.500.00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	88,476,500.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20,409,000.00	PAD,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12,820,000.00	PBH,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3,920,000.00	PBH,
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7,820,000.00	DDS,
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	33,792,500.00	DDS,
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	9,715,000.00	PBH,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89,955,000.00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	53,570,000.00	DDS, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	8,140,000.00	PBH,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	27,495,000.00	DDS, PBH,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	750,000.00	PAD,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26,005,000.00	
3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	11,400,000.00	PAD,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14,605,000.00	PAD, PBH,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	112,527,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	35,930,000.00	PAD,
3.4.03.	Pembinaan PKK	48,767,000.00	PAD, PBH,
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	27,830,000.00	PAD,
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	418.862.200.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	384,667,200.00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	172,677,000.00	DDS,
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	138,231,200.00	DDS,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15,768,500.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	6,215,000.00	DDS,
4.2.94.	Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan	10,777,500.00	DDS,
4.2.95.	Pembangunan Saluran Irigasi	40,998,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20,980,000.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2,575,000.00	DDS,
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8,675,000.00	BMP,
4.4.92.	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	6,120,000.00	PBH,
4.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	3,610,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13,215,000.00	
4.5.90.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	13,215,000.00	DDS,
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	160.203.800.00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	16,203,800.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	16,203,800.00	DDS,

5.3. 5.3.01.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144,000,000.00	DDS,
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	144,000,000.00	
		JUMLAH BELANJA	5,862,174,725.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(277,674,765.00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	277,674,765.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	277,674,765.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Baturetno, 29 Desember 2023

LURAH,

TTD

SARJAKA